



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem

KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDYARGO IKOPUTRA

2. Jabatan : DEPUTI BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi
Pencarian dan Pertolongan

3. NHK : 978781

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.905.000.000

1. Tanah Seluas 3.815 m² di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL
SENDIRI Rp. 295.000.000

2. Tanah Seluas 1.647 m² di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000

3. Tanah Seluas 299 m² di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000

4. Tanah Seluas 192 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000

5. Tanah Seluas 128 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

6. Tanah Seluas 156 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

7. Tanah Seluas 1.113 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 870.000.000

8. Tanah Seluas 360 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

465.000.000



1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 25HP 4X2 5AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV 1.8 CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ 1.5 RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOBIL, INNOVA INNOVA G Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 885.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 353.419.639

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.608.419.639

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.608.419.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.